

**PERANAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT: STUDI KASUS IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR MURAH DI
JAWA TIMUR**

***THE ROLE OF THE STATE IN REALIZING COMMUNITY WELFARE: CASE
STUDY OF IMPLEMENTATION OF THE CHEAP MARKET PROGRAM IN EAST
JAVA***

Novita Dwi Indriani¹, Tiara Nur'aini Rahmawati², Ahmad Mudrikul Huda³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar,
Surabaya, Jawa Timur, 10010121021@student.uinsby.ac.id¹, 10010121028@student.uinsby.ac.id²,
10020121034@student.uinsby.ac.id³

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peranan krusial negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui studi kasus implementasi program bantuan pasar murah di Jawa Timur. Dengan fokus pada peran negara sebagai penyedia layanan sosial, penelitian ini menganalisis bagaimana program bantuan pasar murah dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi implementasi program ini dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini membahas kebijakan publik yang mendasari program tersebut, melibatkan pemetaan dampak positif dan negatifnya terhadap ekonomi rumah tangga. Analisis juga mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam program, mengukur efektivitas distribusi bantuan, serta evaluasi terhadap keberlanjutan dan adaptabilitas program dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam terkait peranan negara dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program bantuan pasar murah. Implikasi temuan ini dapat memberikan kontribusi berharga terhadap perumusan kebijakan lebih lanjut dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan di Jawa Timur.

Kata Kunci: *Welfare State, Bantuan, Layanan Sosial.*

ABSTRACT: This research aims to investigate the crucial role of the state in improving community welfare through a case study of the implementation of a low-cost market assistance program in East Java. By focusing on the role of the state as a provider of social services, this research analyzes how low-cost market assistance programs can be an effective instrument for reducing economic disparities and increasing people's access to basic needs. This research uses a qualitative case study method to explore the implementation of this program and its impact on improving welfare. This research discusses the public policies underlying the program, involving mapping its positive and negative impacts on the household economy. The analysis also includes the level of community participation in the program, measuring the effectiveness of aid distribution, as well as evaluating the sustainability and adaptability of the program infacing economic and social dynamics. It is hoped that the research results will provide an in-depth view regarding the role of the state in designing and implementing policies that support community welfare, especially through low-cost market assistance programs. The implications of these findings can provide a valuable contribution to further policy formulation and sustainable community development in East Java.

Keywords: *Welfare State, Assistance, Social Services.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia yang terletak pada posisi strategis penting dalam jalur perdagangan maritim, berperan sebagai penghubung penting benua Asia dan Australia, serta samudra Pasifik dan Hindia. Akibatnya, jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara menjadi semakin sibuk. Perdagangan terjadi melalui pertukaran berbagai komoditi regional. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan barang yang diproduksi di tempat lain. Untuk memfasilitasi barter, lokasi yang disepakati dipilih, yang akhirnya berkembang menjadi pasar. Munculnya mata uang sebagai alat pembayaran menyebabkan menurunnya barter, dan pasar mulai menawarkan barang serta jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan esensial selalu diminati oleh konsumen di pasar, karena sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia dan memastikan kelangsungannya. Kebutuhan pokok ini terdiri dari tiga jenis: sandang (sandang), pangan (pangan), dan papan (papan). Pertanian memainkan peran penting dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar ini. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data produksi beras setiap tahun.

Di pasar ini terjadilah permintaan serta penawaran terhadap barang yang didagangkan. Penjual memamerkan barang-barang mereka untuk menarik pembeli potensial dan memfasilitasi transaksi. Dalam istilah ekonomi, ini disebut sebagai permintaan. Tujuan permintaan dari calon pembeli adalah untuk meyakinkan penjual agar setuju menjual barang dengan harga yang diminta. Tidak dapat disangkal, permintaan dan penawaran adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari perspektif ini, kita sudah dapat mengamati bahwa permintaan dan penawaran saling terkait erat dalam mendukung perdagangan. Perbedaannya terletak pada sudut pandang: permintaan dilihat dari sudut pandang konsumen, sedangkan penawaran dilihat dari sudut pandang produsen. Dengan seimbangannya permintaan serta penawaran, diiringi tingginya daya pembelian, mengakibatkan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

Dalam beberapa bulan kebelakang, inflasi daerah menjadi isu yang nyata di kalangan masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpengaruh pada harga jual bahan pokok khususnya beras. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang (continue) disebabkan karena tidak seimbangannya arus uang dan barang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemangku kepentingan tertinggi berkewajiban untuk memastikan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurut Nurhasanatan, et al (2023) Peran pemerintah selayaknya mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran sehingga tidak hanya dibebankan oleh masyarakat. Diperkuat oleh pendapat Sari, V. M., et al (2021) Pemerintah sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan pembangunan perekonomian. Ketersediaan beras yang cukup dan harga yang terjangkau adalah salah satu indikator penting untuk mencapai keamanan pangan dan kesejahteraan sosial.

Konsep *welfare state* adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan,

bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan sistem *welfare state* dengan model minimalis tetap memberikan tunjangan yang sangat menimal juga bagi warga negaranya. Dengan demikian, sudah semestinya masyarakat tidak terus menerus mengandalkan bantuan dan tergantung pada pemerintah. Tanggungjawab kesejahteraan pribadi terletak pada masing-masing pribadi itu sendiri, tanpa mengandalkan bantuan pemerintahan yang masih dirongrong adanya perbuatan-perbuatan korup. Sebenarnya jika Pemerintah itu tidak hanya terfokus dan mengutamakan sistem jaminan sosial nasional pada kesehatan saja yang nyatanya masih keteteran, pemerintah mestinya juga memfokuskan serta mengefektifkan perbaikan kualitas sumber daya manusia terlebih dulu yaitu dengan memperbaiki dan membangun aspek moral dan mental manusianya.

Suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* harus mempunyai kebijakan publik yang berisikan bantuan, perlindungan, pelayanan, atau pencegahan terhadap problematika social, termasuk dibidang bantuan hukum. Sistem ini menuntut tanggung jawab nyata dari Negara dalam mensejahterakan warga negara melalui campur tangan penuh dari penyelenggara pelayanan publik mencakup segala pembangunan di bidang-bidang yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat yang maksimum. Hal ini dilakukan dengan mengutus negara dengan kewenangannya untuk turut serta dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat sehubungan dengan asas legalitasnya.⁴ Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu dari tiga fungsi pemerintah yaitu, sebagai penyelenggaraan pembangunan, penyediaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi harus diselenggarakan seimbang sesuai kebutuhan dan keragaman warga Indonesia, kondisi sektoral, dan potensi daerah lainnya yang nantinya suatu pembangunan yang terus berkembang akan membawa suatu kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Jawa Timur masih sangat rendah. Padahal, jika ditinjau lebih dalam, kawasan selatan memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, terutama di bidang pertanian (pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan), sumber-sumber tambang, dan pariwisata. Seharusnya, potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan selatan Jawa Timur. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan selatan Jawa Timur. Pasar murah digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur di sejumlah kabupaten dan kota secara bergiliran. Program Operasi Pasar adalah suatu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan. Dalam pelaksanaannya, program Operasi Pasar dilakukan oleh unit kementerian dengan menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, baik itu di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya.

Pasar murah digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur di sejumlah kabupaten dan kota juga merupakan suatu tanggung jawab yang dilakukan dapat berupa memajukan kesejahteraan masyarakatnya dapat melalui peran pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pelayanan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk upaya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dan juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik tersebut merujuk pada Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah sendiri merupakan sebutan yang mewakili satuan kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah Lainnya yang juga mencakup wilayah pusat dan daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami fenomena sosial melalui analisis mendalam terhadap konteks, makna, dan karakteristik yang kompleks. Penelitian kualitatif merupakan satu kegiatan untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta dunia nyata, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Sedangkan teknik pengumpulan data sendiri menggunakan studi kasus karena merupakan pendekatan yang cocok untuk mengeksplorasi implementasi program bantuan pasar murah di Indonesia, studi ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran negara dalam implementasi program bantuan pasar murah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Penelitian studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Selain wawancara mendalam, ada lima teknik pengumpulan data penelitian Studi Kasus, yakni dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat (*participant observation*), dan artifak fisik. Masing-masing untuk saling melengkapi. Inilah kekuatan Studi Kasus dibanding metode lain dalam penelitian kualitatif. Alasan penulis memilih studi kasus karena data informasi terkait dengan implementasi program bantuan pasar murah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur ini bisa dilakukan melalui wawancara secara langsung dan juga observasi, guna mengetahui detailnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Bentuk pengadaan pasar murah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat** Konsep negara kesejahteraan merujuk pada fungsi yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan beragam layanan dan keuntungan bagi penduduknya, yang mencakup pemeliharaan pendapatan, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan aktivitas sosial. Teori
-

Negara Kesejahteraan diperkenalkan oleh Spicker, yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sistem kesejahteraan sosial di mana negara (pemerintah) memainkan peran utama dalam alokasi dana publik untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Tujuan negara kesejahteraan adalah memberikan layanan sosial kepada seluruh penduduk dengan sebaik mungkin. Upaya negara kesejahteraan terfokus pada integrasi sumber daya dan penyelenggaraan jaringan layanan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Dengan kata lain, negara kesejahteraan menunjukkan bahwa pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraanhidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Meskipun merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang besar, namun tantangan kemiskinan dan ketidaksetaraan tetap ada di beberapa daerah. Bantuan pasar murah di Jawa Timur menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari program bantuan pasar murah di Jawa Timur adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Program ini diimplementasikan untuk membantu kelompok sasaran yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sekaligus memberikan stimulus bagi ekonomilokal.

Dari segi ekonomi, negara kesejahteraan mengacu pada sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu pemerintahan terkait program-program kesejahteraan sosial seperti dalam sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan jaminan sosial. Dalam perspektif politik, negara kesejahteraan adalah suatu entitas yang berupaya mempromosikan kesejahteraan publik sebagaimana yang dijelaskan dari segi ekonomi. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa pelaksanaan program *welfare state* tersebut lebih cenderung digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politis, terutama dalam menghadapi oposisi. Dari dua sudut pandang sebelumnya, terlihat bahwa negara kesejahteraan dapat dianggap sebagai implementasi kebijakan perlindungan sosial-publik oleh suatu negara. Namun, apabila kebijakan ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan politik, hal ini menunjukkan bahwa negara kesejahteraan telah beralih dari fokus ekonomi ke dimensi politik kesejahteraan.

Kelompok sasaran program melibatkan masyarakat Jawa Timur yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, seperti keluarga miskin, pekerja informal, atau kelompok rentanlainnya. Dengan mengidentifikasi kelompok sasaran secara cermat, diharapkan bantuan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal. Desain program bantuan pasar murah mencakup pemilihan jenis barang yang disubsidi, penentuan jumlah subsidi, dan mekanisme distribusi yang efektif. Pemilihan desain yang tepat menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan program dan penerimaan positif dari masyarakat. Pemerintah daerah Jawa Timur Bu Khofifah memegang peran penting dalam implementasi program ini. Keterlibatan pemerintah daerah membantu memastikan bahwa program dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta memfasilitasi kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pedagang lokal dan masyarakat. Implementasi Pasar Murah merupakan inisiatif yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah atau melalui kerjasama dengan badan usaha atau pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok

dengan memberikan subsidi. Proses ini dilakukan dengan cara menyuntikkan subsidi ke pasar-pasar atau melalui sistem droping.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan sosial, penting untuk mengukur dampak program bantuan pasar murah di Jawa Timur. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa program ini memberikan manfaat yang berkelanjutan dan merespon perubahan kebutuhan masyarakat. Gubernur Khofifah menyatakan bahwa penyelenggaraan operasi pasar murah dan distribusi berbagai bantuan serta zakat produktif dilakukan dengan sengaja untuk menstabilkan harga dan menjaga pasokan bahan pokok, sehingga dapat memberikan keringanan bagi beban ekonomi masyarakat.

Baru baru ini, kegiatan pasar murah dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke- 78 Provinsi Jawa Timur tersebut digelar di Pendopo Kridha Manunggal Tuban, Kabupaten Tuban. Pada operasi pasar murah di Tuban yang merupakan titik ke-25 ini disediakan bahan pokok yang dijual dengan harga dibawah harga pasaran. Yaitu, beras medium dengan harga Rp. 10.200/kg, minyak goreng dengan harga Rp. 13.000/liter, gula pasir dengan harga Rp. 13.000/kg, dan telur ayam ras dengan harga Rp. 22.000/kg. Juga dijual aneka produk IKM makanan dan minuman khas Tuban. Operasi pasar murah ini harapannya bisa meringankan beban masyarakat. Sekaligus memudahkan akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Gubernur Khofifah menambahkan, operasi pasar murah ini sekaligus sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Dimana, saat ini, beras medium dan premium di Indonesia harganya di pasaran berada di atas HET.

2. Perkembangan pengadaan pasar murah di Jawa Timur

Efektivitas pasar murah selain didukung oleh ketepatan manajemen waktu juga didukung oleh beberapa faktor manajemen lainnya yaitu manajemen kuantitas dan kualitas serta lokasi pelaksanaan. Stabilisasi harga pangan terutama stabilisasi harga beras merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebab beras merupakan komoditas pangan strategis dan terpenting bagi masyarakat Indonesia dimana sebanyak 16,88% dari total pengeluaran rumahtangga digunakan untuk mengonsumsi beras.¹³ Seperti halnya yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller dalam Praja (2015:6), harga merupakan sesuatu yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang atau jasa.

Pengadaan pasar murah di Jawa Timur terus mengalami perkembangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur secara rutin menggelar pasar murah di beberapa titik lokasi di Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, gencar melaksanakan operasi pasar murah di berbagai titik di Jawa Timur. Tujuan dari operasi pasar murah ini adalah untuk stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan bahan pokok. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga gencar menggelar pasar murah sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pasar murah ini dilaksanakan di berbagai titik di Jawa Timur. Pengadaan pasar murah di Jawa Timur dilakukan secara terus-menerus untuk

membantu masyarakat memperoleh barang kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan implementasi program pasar murah di Jawa Timur. Yang pertama, menjamin akses terhadap kebutuhan dasar, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warganya memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Program pasar murah merupakan salah satu upaya negara dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas harga terjangkau terhadap kebutuhan pokok masyarakat, kedua, mengendalikan inflasi, negara memiliki peran dalam mengendalikan inflasi agar harga-harga barang kebutuhan tidak meningkat secara drastis. Dalam implementasi program pasar murah, negara dapat berperan dalam mengawasi dan mengendalikan harga barang agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat.

Dengan menghadirkan program pasar murah, negara dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Dengan harga barang yang lebih terjangkau, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Keempat, mengurangi kesenjangan sosial, program pasar murah juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Dengan harga barang yang lebih terjangkau, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat memiliki akses yang sama terhadap barang kebutuhan. Kelima, mendorong perekonomian lokal, program pasar murah dapat mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan produsen lokal dalam penyediaan barang kebutuhan. Hal ini dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam implementasi program pasar murah di Jawa Timur, negara berperan sebagai pengatur dan fasilitator untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Negara dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, produsen, dan pedagang untuk mengatur harga, memastikan ketersediaan barang, dan memonitor pelaksanaan program secara keseluruhan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Tito Karnavian, pemerintah daerah diminta untuk menjaga 3 komoditas yang kerap menyumbang inflasi, diantaranya adalah gula, beras, cabai rawit. Karenanya, pemkot telah menyiapkan skema dalam upaya menjaga stok bahan pangan dan distribusi. Yakni, memiliki neraca komoditi terhadap stok beras dan gula, serta menjalin kerjasama dengan daerah penghasil cabai.

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakiktnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir dari welfare state yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan akhir tersebut tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham welfare state biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah

mewujudkan “keadilan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD1945.

Konsep ideologi negara kesejahteraan demikian diterapkan dengan maksud untuk menganulir kesenjangan sosial ekonomi atau paling tidak meminimalisirnya, peningkatan kecerdasan bangsa, perolehan pekerjaan yang layak, jaminan adanya penghasilan yang wajar, jaminan terpeliharanya anakanak yatim dan piatu, jaminan terpeliharanya janda-janda dan orang lanjut usia, pelayanan kesehatan yang memuaskan, dan terhindarnya rakyat dari kelaparan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi welfare state, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya melalui sektor pertambangan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat”.¹⁴

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Selamat atas terselesainya penelitian jurnal dengan judul “Peranan Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Implementasi Program Pasar Murah di Jawa Timur”. Ucapan terima kasih dengan tulus kepada para peneliti yang telah berkontribusi dalam mengungkap peranan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bernilai dan menjadi dasar untuk kebijakan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

E. DAFTAR

PUSTAKA Skripsi

Abadi, Devira Tiafani. (2018). Implementasi Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) dalam Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik di Jawa Timur. SKRIPSI, (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). hal. 3.

Jurnal

Dahlan, A. (2014). Mengagas Negara Kesejahteraan. el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, Volume. 2, Nomor 1, hal. 1-22.

Fauzi, Achmad, dkk. (2023). Pengaruh Permintaan dan Penawaran Terhadap Kebutuhan Pokok di Pasar. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol 2 No. 2, hal 29.

Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1, No. 1, hal. 24.

- Huda, Ni'matul, (2006). Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1.
- Libra, Robert dan Muhammad, F. Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau. *Jurnal ESENSI HUKUM*, Vol. 5 No. 1. (Juni, 2023), hal. 46.
- Marilang. Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, (Juni, 2012), hal 267.

Undang-Undang

- Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

Jurnal

- Putra, Maulana Y. A. D dan Rosyidatuzzahro A. (2023). Distribusi Beras Murah Untuk Masyarakat Oleh PT. Jatim Grha Utama Dalam Gelaran Operasi Pasar Lumbung Pangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, hal. 60.
- Reswari, R. A. dan Singgih, M. (2023). Efektivitas Program Operasi Pasar Penutupan Satu Abad NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. *Economic and Business Management International Journal*. Vol. 5| No. 3. hal. 225-226.
- S Arliman, Laurensius. (2016). Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Lex Jurnalica*, Volume 13. Nomor 3.
- Suprayitno, Eko. (2008). *Ekonomi Mikro Islam*. (Malang: UIN Malang Press), hal. 205.
- Yunita, Linda Desma dan Tri H. (2018). Strategi Bauran Promosi Penyelenggaraan Event (Studi Kasus Perencanaan dan Penyelenggaraan Event Pasar Murah). *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* Vol. 4, No.1), hal. 18.

Berita Online

- <https://kominform.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-gelar-pasar-murah-dan-salurkankan-bantuan-di-tuban> diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 20.31